

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2017



BUPATI GARUT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR :

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN GARUT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 154 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati Garut tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),
16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2105;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

28. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 74);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2018**

KESATU : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

- KETIGA : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA, dijadikan pedoman untuk menyusun dokumen anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Biaya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

B U P A T I G A R U T,

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR

TANGGAL

DAFTAR NOMOR REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Otto Iskandardinata No. 278 Telp. (0262) 2801834 Garut

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

Nomor :

Tentang

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

- Mengingat :
1. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2018 dan Rencana Strategis Badan Pndapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019 perlu disusun dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018;
 2. bahwa Rencana Kerja Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2018;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah
- Menimbang :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2105;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
24. Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 74);

25. Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Badan Pendapatan Daerah;
2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2019, yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang dipisahkan dari Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019;
3. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah 2018 yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

BAB II

SISTEMATIKA RENJA

Pasal 2

Sistematika Renja SKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Memuat Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan

BAB IV Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2018

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal, 2017

Menyetujui :
BUPATI GARUT

**KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP

U. BASUKI EKO, SH, MH
Pembina Tk I
NIP. 19661230 199703 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA KAB. GARUT
NOMOR :
TANGGAL :

Susunan Tim :

1. Penanggungjawab: Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Bapenda.
4. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama BAPENDA;
 - b. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BAPENDA;
 - c. Kepala Bidang Penagihan BAPENDA;
 - d. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BAPENDA;
5. Kelompok Kerja :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BAPENDA;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD pada Sekretariat BAPENDA;
 - c. Kepala Subbidang Pendataan PBB dan BPHTB
 - d. Kepala Subbidang Pendataan Pajak Lainnya;
 - e. Kepala Subbidang Pelayanan dan Keberatan;
 - f. Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB;
 - g. Kepala Subbidang Penagihan Pajak Lainnya;
 - h. Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - i. Kepala Subbidang Perencanaan;
 - j. Kepala Subbidang Pengembangan Regulasi;
 - k. Kepala Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi;
 - l. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - m. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi;
 - n. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan PBB dan BPHTB;

Tugas Tim :

1. Ketua :
Mengkoordinasikan tugas tim dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah.
2. Sekretaris :
Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun.

3. Anggota :
- Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Kelompok Kerja :
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah;
 - c. review renja kementerian/lembaga dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - d. penelaahan RTRW Kabupaten Garut;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah;
 - j. mempelajari surat edaran Bupati Garut perihal penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RKPD Kabupaten Garut yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD Kabupaten Garut;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah, guna mencapai target kinerja program prioritas RKPD Kabupaten Garut yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Garut;

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal, 2017

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

U. BASUKI EKO, SH, MH
Pembina Tk I
NIP. 19661230 199703 1 002



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR**

TENTANG

**RENCANA KERJA (R E N J A)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2018**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Badan Pendapatan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya. Rencana Kinerja (RENJA) SKPD adalah dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan rancangan awal RKPd serta memperhatikan rancangan awal RKP.

Manfaat penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Teraplikasinya RENSTRA secara lebih rinci
2. Tersusunnya indikator pencapaian hasil pelaksanaan program tahunan
3. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai *performance agreement*
4. Memudahkan proses pengukuran kinerja
5. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja dan menetapkan kinerja periode berikutnya
6. Memudahkan penetapan spesifikasi pekerjaan atas dasar capaian kinerja

Renja SKPD Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Renja SKPD ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah pada tahun berjalan serta menjadi panduan bagi pelaksanaan pembangunan sesuai prinsip *Good Governance*.

Garut, 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT

U. BASUKI EKO, SH., MH.
NIP. 19661230 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

 1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU..... 5

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
 Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 5

 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan 13

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 19

 2.4 Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN..... 29

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi 29

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah..... 32

 3.3 Program dan Kegiatan 34

BAB IV PENUTUP..... 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut (RPJMD Kabupaten Garut) Tahun 2014 – 2019, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kabupaten/Kota sebagai pemerintahan daerah merupakan bagian dari daerah propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. RKPD tersebut memuat evaluasi dan capaian kinerja tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan dasar / pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Undang-undang seperti dijelaskan di atas memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi Kabupaten Garut untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar pembangunan untuk mewujudkan "**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera**". Pembangunan Kabupaten Garut dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan Kabupaten Garut secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya adalah mempertemukan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-prinsip dasar agar tercapai hasil pembangunan yang optimal dan berkeadilan adalah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Melibatkan semua pelaku pembangunan;
2. Mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
3. Memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal;
4. Mencegah degradasi sumber daya dan penurunan fungsi.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang baik pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Badan Pendapatan Daerah dan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Garut.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut berpedoman pada beberapa landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah disusun sebagai upaya untuk membuat pedoman dan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan bidang keuangan untuk periode 1 tahun berdasarkan rencana strategis SKPD dan RKPD Kabupaten Garut sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai perumusan dari Renstra DPPKA dan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan program dan kegiatan yang direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2018 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana
Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut :

A. Misi Pertama : **Mewujudkan DPPKA sebagai SKPD yang Profesional.**

Untuk menunjang misi pertama di atas, dialokasikan sebanyak 7 kegiatan atau 9.09% dari seluruh kegiatan DPPKA dengan anggaran mencapai Rp. 2.746.732.655,- atau 4,14%.

Dengan Pencapaian Kinerja yang diharapkan dapat tercapai sebagai SKPD yang profesional dan bisa melaksanakan fungsi koordinasi dengan SKPD lain.

B. Misi Kedua : **Mencapai Target Pendapatan Daerah secara Optimal**

Sebagai upaya dalam mencapai target pendapatan daerah secara optimal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dilaksanakan kegiatan sebanyak 20 kegiatan atau 74,03% dari keseluruhan kegiatan yang ada pada Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset dengan akumulasi anggaran sebesar Rp. 6.567.076.700,- atau 9,90%. sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1				
REALISASI PENDAPATAN				
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET				
KABUPATEN GARUT				
TAHUN ANGGARAN 2016				
NO	URAIAN	REALISASI 2016	ANGGARAN 2017	PERTUMBUHAN
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	430,464,182,280.00	450,319,460,422.92	4.61%
	Hasil Pajak Daerah	83,398,777,015.00	110,476,840,367.29	32.47%
	Retribusi Daerah	17,716,949,504.00	17,002,212,640.63	-4.03%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,510,715,914.00	5,206,555,533.00	-5.52%
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	323,837,739,847.00	317,633,851,882.00	-1.92%
2	PENDAPATAN TRANSFER	2,470,089,016,840.00	2,831,106,056,471.00	14.62%
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	156,164,744,174.00	173,753,187,945.00	11.26%
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,808,709,871,000.00	1,972,456,204,526.00	
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	505,214,401,666.00	684,896,664,000.00	35.57%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	893,573,984,839.00	577,995,680,160.00	-35.32%
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	18,998,000,000.00	3,631,939,848.00	-80.88%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95,917,571,656.00	178,135,068,312.00	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	358,096,736,355.00		
	Dana Transfer lainnya/Pendapatan Lainnya	420,561,676,828.00	396,228,672,000.00	-5.79%
	JUMLAH	3,794,127,183,959.00	3,859,421,197,053.92	1.72%

Sumber : Bidang Akuntansi dan Bidang Anggaran DPPKA

Target pendapatan sebagaimana tabel diatas, selain pendapatan yang dikelola langsung oleh DPPKA sebagai SKPD juga dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi untuk pendapatan di SKPD lain.

C. Misi Ketiga : **Mewujudkan Kebijakan Penganggaran yang Efektif dan Efisien**

Dalam mewujudkan kebijakan penganggaran yang efektif dan efisien pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dilaksanakan kegiatan sebanyak 6 kegiatan atau 7,79% dari keseluruhan kegiatan yang ada pada Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset dengan akumulasi anggaran sebesar

Rp. 1.814.057.855,- atau 2,73%. Wujud pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi capaian kinerja misi ini meliputi pengelolaan keuangan dan aset pada DPPKA sebagai SKPD juga di SKPD lain sebagai pelaksanaan fungsi DPPKA sebagai SKPKD.

D. Misi Keempat : **Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akurat dan Akuntabel**

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akurat dan akuntabel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan atau 16,88% dengan anggaran sebesar Rp. 3.037.088.748,- atau 4,58% sehingga diharapkan hasil yang dicapai dapat terwujud dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset yang akuntabel.

Dalam rangka optimalisasi pembangunan, idealnya setiap kabupaten sebagai daerah otonomi harus memiliki dan mampu mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri. Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah otonomi di wilayah Propinsi Jawa Barat hingga saat ini masih tergolong sebagai daerah yang memiliki PAD relatif rendah. Berkenaan dengan hal tersebut maka upaya-upaya penggalan berbagai potensi sumberdaya alam, baik hayati maupun non hayati perlu terus ditingkatkan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Menyadari penting dan mendesaknya tuntutan masyarakat dalam percepatan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan antara lain adanya Badan Pendapatan Daerah dalam struktur organisasinya. Badan Pendapatan Daerah dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Sektor pendapatan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini karena Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi yang besar dengan topografi wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar di Jawa Barat. Topografi Kabupaten Garut yang luas bagi pengembangan pendapatan terutama dari sektor PBB dan BPHTB. Dan perkembangan wilayah Garut terutama dari sektor pariwisata dan perkembangan perkotaan untuk peningkatan pajak daerah lainnya. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah memandang perlu terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pelayanan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja SKPD sesuai prinsip good governance. Oleh karenanya, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Capaian kegiatan pembangunan dan pelayanan di bidang pendapatan di Kabupaten Garut pada Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1.1 Capaian Kinerja Pendapatan dari PBB dan BPHTB.

Pembangunan bidang Pendapatan masih tetap ditujukan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak daerah melalui penerimaan dari PBB dan BPHTB. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan melaksanakan pendataan berkelanjutan melalui pendataan objek dan subjek PBB yang dilakukan setiap tahun di kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Garut untuk meningkatkan jumlah objek dan subjek PBB di Kabupaten Garut kegiatan penilaian individual, verifikasi objek dan subjek PBB dan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi para wajib pajak untuk peningkatan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah .

Pada tahun anggaran 2016, pembangunan bidang pendapatan di Kabupaten Garut menitikberatkan pada peningkatan pendapatan dari sektor PBB dan BPHTB melalui peningkatan objek pajak dan subjek pajak. Program pembangunan pendapatan dilaksanakan oleh bidang pendataan dan bidang penagihan DPPKA Kabupaten Garut.

1. Pencapaian objek dan subjek PBB dan BPHTB

Pencapaian objek pajak PBB Kabupaten Garut tahun 2016 sebesar 1.203.329 objek pajak apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 1.274.796 Objek pajak, mengalami penurunan sebesar -5.61 % .Penurunan pertumbuhan objek dan subjek PBB tersebut disebabkan dampak dari penghapusan objek pajak yang tidak ada objek pajak PBB (TO) dan dampak dari proyek pembangunan sarana transportasi dan irigasi. Objek PBB untuk tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -5,61% demikian juga dengan wajib pajak BPHTB pencapaian WP BPHTB tahun 2016 sebesar 1.921 WP mengalami penurunan sebesar -3,03% dibandingkan dengan pencapaian WP BPHTB tahun 2015 sebesar 1.981 WP

Tabel 2.2
Pencapaian objek dan subjek PBB

No	Uraian	Tahun			Pencapaian	
		2015	2016		Pencapaian Target	Peningkatan
		Realisasi	Ketetapan	Realisasi	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Objek Pajak PBB	1.274.796	1.222.935	1.203.329	98.40	-5,61
2	Wajib Pajak BPHTB	1.981	1.981	1.921	96,97	-3,03

2. Pencapaian Penerimaan PBB dan BPHTB

Total pencapaian realisasi penerimaan PBB pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 26.148.983.974. sedangkan realisasi penerimaan PBB pada tahun 2015 sebesar Rp. 20.293.893.686 Pencapaian realisasi penerimaan PBB pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015

mengalami peningkatan sebesar 28,85%, sebaliknya realisasi penerimaan BPHTB tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.454.564.884 mengalami penurunan sebesar -14,25% dari realisasi penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 9.859.700.663 tetapi realisasi penerimaan total dari PBB dan BPHTB tahun 2016 sebesar Rp. 34.603.548.858 mengalami peningkatan sebesar 14,76% dibanding dengan realisasi penerimaan total pada tahun 2015 sebesar Rp. 30.153.594.349

Tabel 2.3
Realisasi Pencapaian Penerimaan PBB dan BPHTB
Tahun 2016

No	Uraian	Tahun			Pencapaian	
		2015	2016		Pencapaian Target	Peningkatan
		Realisasi	Target	Realisasi	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak PBB	20.293.893.686	25.585.788.100	26.148.983.974	102,20	28,85
2	BPHTB	9.859.700.663	10.368.915.508	8.454.564.884	81,54	-14,25
	Total	30.153.594.349	35.954.703.608	34.603.548.858	96,24	14,76

2.1.2 Capaian Kinerja Pendapatan dari Pajak Daerah Lainnya.

1. Pencapaian Wajib Pajak pada Pajak Daerah Lainnya
Pencapaian total wajib pajak pada pajak daerah lainnya di Kabupaten Garut pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015, mengalami kenaikan sebesar 0,04 % kenaikan tersebut disebabkan dari pengawasan pajak daerah dan penertiban pajak daerah. Wajib pajak pada pajak daerah lainnya untuk tahun 2016 yang peningkatannya signifikan yaitu wajib pajak MBLB sebesar 42,86% dan wajib pajak hiburan sebesar 30% tetapi terjadi penurunan jumlah wajib pajak pada pajak air tanah sebesar -8,29% dan pada pajak reklame sebesar -0,44%. Total wajib pajak pada pajak daerah lainnya pada tahun 2016 sebanyak 2495 WP sedangkan wajib pajak pada tahun 2015 sebanyak 2496 WP.

Tabel 2.4

**Pencapaian Wajib Pajak pada Pajak Daerah Lainnya
tahun 2016**

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	Peningkatan
		Realisasi	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel	81	85	5
2	Pajak Restoran	152	159	5
3	Pajak Hiburan	20	26	30
4	Pajak Parkir	15	17	13,33
5	Pajak MBLB	7	10	42,86
6	Pajak Air Tanah	181	166	-8,29
7	Pajak Sarang Burung Walet	12	15	25
8	Pajak Reklame	2026	2017	-0,44
9	Pajak Penerangan Jalan	1	1	0
	Total	2495	2496	0,04

2. Pencapaian SPTPD dan SKP pada Pajak Daerah Lainnya

Pencapaian total SPTPD dan SKP pada pajak daerah lainnya di Kabupaten Garut pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015, mengalami penurunan sebesar 23,26 % penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kesadaran dan kepatuhan Wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. SPTPD dan SKP pajak daerah lainnya untuk tahun 2016 yang peningkatannya signifikan yaitu SPTPD pajak hiburan sebesar 11,27% dan SPTPD pajak sarang burung walet sebesar 23,07% tetapi terjadi penurunan jumlah SKP pajak pada pajak MBLB sebesar -13,23% dan pada SPTPD pajak air tanah sebesar -7,93%. Total SPTPD dan SKP pajak pada pajak daerah lainnya pada tahun 2016 sebanyak 7097 SPTPD dan SKP sedangkan wajib pajak pada tahun 2015 sebanyak 7266 SPTPD dan SKP.

Tabel 2.5

Pencapaian SPTPD dan SKP pada Pajak Daerah Lainnya
tahun 2016

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	Peningkatan
		Realisasi	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel	877	924	5,36
2	Pajak Restoran	1688	1662	-1,54
3	Pajak Hiburan	204	227	11,27
4	Pajak Parkir	167	182	8,98
5	Pajak MBLB	68	59	-13,23
6	Pajak Air Tanah	2182	2009	-7,93
7	Pajak Sarang Burung Walet	13	16	23,07
8	Pajak Reklame	2026	2017	-0,44
9	Pajak Penerangan Jalan	1	1	0
	Total	7266	7097	-23,26

3. Pencapaian Penerimaan PAD pada Pajak Daerah Lainnya

Pencapaian penerimaan PAD dari pajak daerah lainnya di Kabupaten Garut pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015, mengalami kenaikan sebesar 9,75 % kenaikan tersebut disebabkan dari meningkatnya jumlah wajib pajak dari penggalian potensi wajib pajak baru terutama setelah terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Garut dan kenaikan tarif pajak daerah. Penerimaan PAD pada pajak daerah lainnya untuk tahun 2016 yang peningkatannya signifikan yaitu penerimaan pajak hiburan sebesar 42,60% dan penerimaan pajak restoran sebesar 24,07% tetapi terjadi penurunan jumlah penerimaan pajak pada pajak air tanah sebesar - 7,42% dan pada penerimaan pajak MBLB sebesar -7,47%. Total penerimaan pajak pada pajak daerah lainnya pada tahun 2016 sebesar Rp. 48.796.228.157 sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 44.042.151.976.

Tabel 2.6

Pencapaian Penerimaan Pajak pada Pajak Daerah Lainnya
tahun 2016

No	Uraian	Tahun			Pencapaian	
		2015	2016		Pencapaian Target	Peningkatan
		Realisasi	Target	Realisasi	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	6.873.301.142	7.190.000.000	7.363.636.722	102,41	6,66
2	Pajak Restoran	7.814.387.761	9.700.000.000	10.291.435.756	106,10	24,07
3	Pajak Hiburan	1.274.191.039	2.120.000.000	2.219.966.395	104,72	42,60
4	Pajak Parkir	173.741.550	195.000.000	204.056.920	104,64	14,86
5	Pajak MBLB	2.701.297.505	2.124.000.000	2.513.569.306	118,34	-7,47
6	Pajak Air Tanah	1.231.544.113	2.100.000.000	1.146.465.633	54,59	-7,42
7	Pajak Sarang Burung Walet	8.180.000	10.000.000	10.002.000	100,02	18,22
8	Pajak Reklame	3.378.260.602	3.430.000.000	3.604.299.409	105,08	6,27
9	Pajak Penerangan Jalan	20.587.248.264	21.440.000.000	21.444.796.016	100,02	4,00
	Total	44.042.151.976	48.308.990.000	48.798.228.157	101,01	9,75

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2018 permasalahan yang muncul saat ini perlu diidentifikasi secara komprehensif, agar hambatan yang mendesak dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset dapat diselesaikan. Dengan demikian, rencana kerja dapat tepat sasaran dan mampu menjawab semua permasalahan nyata yang dihadapi.

Permasalahan strategi yang harus menjadi perhatian selama tahun 2017 sehingga dapat direncanakan menjadi prioritas kinerja dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 terkait dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2014-2019 :

- 1.) Sistem informasi teknologi yang memadai dan menyeluruh pada Pengelolaan Pendapatan yang diharapkan dapat terintegrasi ke seluruh SKPD sehingga mempercepat perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan.
- 2.) Peningkatan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan.
- 3.) Upaya peningkatan pendapatan secara maksimal, terutama dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.
- 4.) Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.
- 5.) Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagai kewajiban melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mencakup **Sasaran, Program dan Kegiatan** yang dilaksanakan pada tahun sebelum penyusunan Renja (Tahun 2016) masih mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 serta telah mengalami beberapa revisi disesuaikan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permen 13 Tahun 2006 .

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut melalui dua bidang yaitu bidang pendataan dan bidang penagihan DPPKA Kab. Garut pada Tahun 2016 telah melaksanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan

target kinerja pada dokumen RENSTRA yang dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 meliputi 1 program dan 93 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 22.656.108.800 (*dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 22.209.000.628.

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016, seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik dan seluruh kegiatan masuk kategori "**efektif**" dan "**efisien**".

Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD tahun 2017 sebagai bahan rencana tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang merupakan SKPD hasil split (pemisahan) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan fungsinya sebagai SKPD mempunyai tanggung jawab lebih dalam pengelolaan pendapatan dalam struktur APBD Kabupaten Garut. Seiring dengan perubahan regulasi yang dinamis banyak hal yang harus dipersiapkan pada tahun 2017 yang juga menjadi target sasaran kinerja tahun 2018 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten dan tahun pertama Renstra SKPD sebagaimana visi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah meliputi:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah.
2. Peningkatan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan sumber daya aparatur yang profesional.

Berkaitan dengan perannya sebagai SKPD pengelola pendapatan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, dimana Badan Pendapatan Daerah yang mengemban tugas untuk melaksanakan tugas ini harus senantiasa melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman ke masyarakat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui PBB-P2.

Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan dan penatausahaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Garut. Sebagaimana nilai filosofi yang hendak dicapai oleh peraturan daerah tersebut yaitu :

1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
2. Pemberian kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah; dan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan perpajakan dan retribusi.

Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah selaku *stakeholder* dalam pengelolaan pendapatan harus terus bersiap diri. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah agar memperoleh dampak positif secara maksimal, diantaranya:

1. Mempersiapkan kelengkapan peraturan untuk keseluruhan penyelenggaraan pendaerah PBB P2, mulai dari tata cara pendataan, pemungutan sampai dengan mempersiapkan akun pada struktur APBD;
2. Memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Membentuk basis data yang lebih akurat;
5. Mempersiapkan perangkat kerja yang memadai baik software maupun hardware;
6. Memperbaiki sistem pemungutan dan pengawasan.

Sebagai bahan untuk upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2016 potensi PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Garut sebagai berikut :

1. PBB	: 1.305.068 Wajib Pajak
2. BPHTB	: 2.003 Wajib Pajak
3. Restoran	: 153 Wajib Pajak
4. Hotel	: 78 Wajib Pajak
5. Mineral Bukan Logam dan Batuan	: 6 Wajib Pajak
6. Parkir	: 15 Wajib Pajak
7. Air Tanah	: 179 Wajib Pajak
8. Walet	: 9 Wajib Pajak
9. Hiburan	: 19 Wajib Pajak
10. Reklame	: 2.024 Wajib Pajak
11. Pajak Penerangan Jalan	: 1 Wajib Pajak (PLN)

2.4 Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok DPPKA dalam pengelolaan keuangan serta tugas lain dalam Bidang Pemerintahan Umum, telah disusun rencana program kegiatan tahun 2017 yang terdiri dari 7 program dan 91 kegiatan.

Yang juga harus menjadi perhatian adalah terkait visi jangka menengah Kabupaten Garut ***"Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera"***.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yang menjadi bagian dari Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. **Bermartabat**, dalam aspek layanan umum yang direncanakan terkait upaya peningkatan pelayanan pajak daerah yang maksimal kepada wajib pajak dan masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai sebagai penunjang pelayanan prima, dan peningkatan kualitas aparatur pengelola perpajakan.
2. **Nyaman**, dalam aspek layanan umum yang direncanakan terkait upaya peningkatan cakupan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar 65%. Kaitannya dengan tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah dalam hal pajak yang diterima melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dimana ketika ada peningkatan pembayaran PJU maka diharapkan ada peningkatan PPJ.
3. **Sejahtera**, hal ini terkait dengan misi Badan Pendapatan Daerah yang mengupayakan perencanaan pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien yang berorientasi pelayanan kebutuhan masyarakat.

Adapun rumusan review rancangan awal RKPD sebagaimana tabel berikut :

BAB III
TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah melaksanakan sebagian urusan administrasi keuangan daerah di bidang pajak daerah. Dengan melihat tugas pokok tersebut, kebijakan nasional yang menjadi arahan adalah kebijakan Kementerian Keuangan. Adapun arah kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum di dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015 - 2019

No.	Arah Kebijakan	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaganya kesinambungan fiskal	Renstra Kementerian Keuangan RI 2015-2019	
2.	Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan dan reformasi kepabean dan cukai		
3.	Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara		
4.	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah		
5.	Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran		
6.	Peningkatan pengawasan di bidang kepabean dan cukai serta perbatasan		

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan memiliki 11 program kerja yaitu :

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaKementerian Keuangan

2. Pengelolaan anggaran negara
3. Peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak
4. Pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabean
5. Pengelolaan perbendaharaan negara
6. Pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang
7. Peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah
8. Pengelolaan pembiayaan dan risiko
9. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian
10. Perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan
11. Pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang keuangan negara

Sedangkan kebijakan provinsi yang menjadi arahan adalah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mencakup dua aspek yakni Pendapatan dan Pelayanan.

Kinerja pendapatan mencakup :

1. Pelaksanaan Pungutan

a) Intensifikasi

- Penyempurnaan Landasan Hukum Pungutan
- Penyesuaian Struktur Tarif Pajak
- Penyempurnaan Database Potensi Pendapatan Daerah
- Sosialisasi Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah Pencairan Tunggal
- Membuat Database dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Daerah

b) Ekstensifikasi

- Penggalan WP / WR Baru
- Perluasan Objek Pajak Baru
- Antisipasi Pungutan Pajak Baru

c) Revitalisasi BUMD untuk Peningkatan Kontribusi PAD

d) Optimalisasi Pemberdayaan Asset yang Diarahkan Pada Peningkatan PAD

2. Administrasi Pemungutan

- a) Penyempurnaan atas Regulasi Administrasi Pungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- b) Penyusunan Software Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah
- c) Rekonsiliasi secara Periodik Antara Dinas Pendapatan, Â Biro Keuangan , Kas Daerah dan Kab / Kota
- d) Melakukan Pembinaan Teknis Pungutan Kepada SKPD Penghasil dan Kab / Kota

3. Koordinasi

- a) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat (Depdagri, Dep. Keuangan, Dep. Energi , dan DPR RI , dll)
- b) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Lain
- c) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota
- d) Melakukan Koordinasi Dengan Polri dan PT. Jasa Raharja
- e) Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait Kab / Kota

4. Anggaran

- a) Penerapan Prinsip Anggaran Kinerja (Output, Input, Income, Benefit dan impact)
- b) Perencanaan Anggaran Dianalisis Pada Standar Analisis Biaya (SAB)
- c) Perencanaan Anggaran Secara Efektif Efisien , Dan Akuntabel
- d) Tertib Administrasi Anggaran
- e) Penerapan Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

5. Pembinaan

- a) Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Melekat (Waskat)
- b) Pembinaan Pelaksanaan Pungutan Secara Periodik
- c) Pembinaan Disiplin Kerja
- d) Pembinaan Etika Dan Moral PNS

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut harus dijabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional agar tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dapat tercapai.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi menunjukkan kondisi yang ingin dicapai serta berdasarkan pada isue dan analisis strategis. Untuk mencapai visi dan misi, Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 Misi 4 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan sesuai visi misi Badan Pendapatan Daerah menjadi tiga tujuan yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Target Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah yang Kompeten

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut, Badan Pendapatan Daerah periode 2017-2019 menetapkan tiga sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dan Revisi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah ditetapkan tujuan

dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Peningkatan Target Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkat 8,27%
2.	Meningkatkan kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah yang kompeten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori BB
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori Baik

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, juga dalam rangka pencapaian Target Kinerjanya Badan Pendapatan Daerah perlu ditunjang dengan program dan kegiatan. Pada tahun 2018 program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 7 program dan 60 kegiatan. Target Pendapatan tahun 2018 dan program dan kegiatan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

BAB IV PENUTUP

Dalam menyusun Renja SKPD Tahun Anggaran 2017 ini, acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan, arah Kebijakan Umum – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan rencana program indikatif dinas yang telah dirembukkan dengan seluruh unsur pelaku pembangunan Pengelolaan Keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Renja SKPD Tahun Anggaran 2018 sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, juga merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Garut. RENJA SKPD adalah sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.

Proses penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2018 yang memuat rencana kegiatan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut melalui serangkaian musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2017

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

No	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan		Lokasi (Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan		Indikator Kinerja					Biaya (Rp)					Perkiraan Maju	Keterangan		
			Kel	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PH LN	Sumber Dana Lainnya		Total	SKPD Penanggung Jawab	Kategori Kegiatan
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Meningkatnya Penyelenggaraan pelayanan Administrasi perkantoran	100%					1.536.378.000,00				1.536.378.000	1.843.653.600		
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Materai	3360 lembar	Terselenggaranya administrasi surat menyurat	3360 lembar	15.000.000,00				15.000.000	18.000.000	Bapenda	Renja
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bln	Terselenggaranya fungsi pelayanan secara maksimal	12 Bln	90.000.000,00				90.000.000	108.000.000	Bapenda	Renja
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya data administrasi keuangan	Dokumen	Terciptanya pelayanan administrasi keuangan yang andal dan prima	Dokumen	107.006.000,00				107.006.000	128.407.200	Bapenda	Renja
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya jasa cleaning service	1 paket	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan indah	1 paket	18.950.000,00				18.950.000	20.845.000	Bapenda	Renja
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	25 Unit	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	25 Unit	10.000.000,00				10.000.000	12.000.000	Bapenda	Renja
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai sarana penunjang administrasi perkantoran	1 paket	Tersedianya fasilitas perkantoran yang memadai	1 paket	201.640.000,00				201.640.000	241.968.000	Bapenda	Renja
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Barang Cetak sebagai sarana penunjang administrasi perkantoran	1 paket dan 176000 lbr	Tersedianya fasilitas perkantoran yang memadai	1 paket dan 176000 lbr	110.000.000,00				110.000.000	132.000.000	Bapenda	Renja
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	316 Buah	Tersedianya fasilitas perkantoran yang memadai	316 Buah	25.180.000,00				25.180.000	30.216.000	Bapenda	Renja
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket dan 16 Unit	Tersedianya fasilitas perkantoran yang memadai	1 paket dan 16 Unit	500.000.000,00				500.000.000	600.000.000	Bapenda	Renja
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Koran dan majalah sebagai media informasi	koran dan majalah	Terpenuhinya kebutuhan informasi	koran dan majalah	27.252.000,00				27.252.000	32.702.400	Bapenda	Renja
	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya makanan dan minuman	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	1 paket	163.950.000,00				163.950.000	196.740.000	Bapenda	Renja
	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	160.000.000,00				160.000.000	192.000.000	Bapenda	Renja

No	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan		Lokasi (Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan)		Indikator Kinerja						Biaya (Rp)					Perkiraan Maju	Keterangan	
			Kel	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PH LN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Kategori Kegiatan
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	13	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis	Sukagalih	Tarogong Kidul			Meningkatkan kinerja tenaga administrasi /teknis	12 Orang	Meningkatkan kinerja tenaga administrasi /teknis	12 orang	62.400.000,00				62.400.000	74.880.000	Bapenda	Renja
	14	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis lainnya	Sukagalih	Tarogong Kidul			Meningkatkan kinerja tenaga administrasi /teknis	9 Orang	Meningkatkan kinerja tenaga administrasi /teknis	9 Orang	45.000.000,00				45.000.000	54.000.000	Bapenda	Renja
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan	100%					3.789.357.260,00				18.789.357.260	4.547.228.712		
	1	Pembangunan Gedung Kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya bangunan kantor dan pelayanan yang representatif	1 Unit	Meningkatnya sarana dan Pelayanan Pajak	12 Bulan		15.000.000.000			15.000.000.000	-		
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya kendaraan dinas/ operasioanal	2 unit dan 10 Unit	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang optimal	3 unit dan 10 Unit	750.000.000,00				750.000.000	900.000.000	Bapenda	Renja
	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Ruangan Yang Representatif	1 paket	Tersedianya Ruangan Yang Representatif	1 paket	151.200.000,00				151.200.000	181.440.000	Bapenda	Renja
	4	Pengadaan Mebeulair	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya meja kerja dan kursi kerja sebagai sarana penunjang aparatur	2 paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang optimal	2 paket	269.017.260,00				269.017.260	322.820.712	Bapenda	Renja
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul			Terpenuhinya Perbaikan/ Pemeliharaan Gedung Kantor Secara Berkala	1 Paket	Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor Secara Berkala	1 Paket	30.000.000,00				30.000.000	36.000.000	Bapenda	Renja
	6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya kendaraan dinas/ operasioanal yang siap pakai	12 bulan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang optimal	12 bulan	89.140.000,00				89.140.000	106.968.000	Bapenda	Renja
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya fasilitas perbaikan/ rehabilitasi geudng kantor	12 bulan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang optimal	12 bulan	2.500.000.000,00				2.500.000.000	3.000.000.000	Bapenda	Renja
											-				-	-		
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Meningkatnya disiplin pegawai	100%					67.850.000,00				67.850.000	81.420.000	Bapenda	Renja
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya pakaian dinas	1 Paket	Terwujudnya keseragaman pakaian sebagai wujud kedisiplinan aparatur	1 Paket	35.000.000,00				35.000.000	42.000.000	Bapenda	Renja
	2	Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya batik dinas	1 Paket	Terwujudnya keseragaman pakaian sebagai wujud kedisiplinan aparatur	1 Paket	32.850.000,00				32.850.000	39.420.000	Bapenda	Renja
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Meningkatnya mutu Kapasitas aparatur	100%					250.000.000,00				250.000.000	300.000.000		

No	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan		Lokasi (Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan)		Indikator Kinerja						Biaya (Rp)					Perkiraan Maju	Keterangan	
			Kel	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PH LN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Kategori Kegiatan
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur	1 Paket	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur	1 Paket	250.000.000,00				250.000.000	300.000.000	Bapenda	Renja
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sukagalih	Tarogong Kidul	Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD	100%					22.334.000,00				22.334.000	26.800.800		
	1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1 Paket	Meningkatnya capaian dan realisasi kinerja SKPD	1 Paket	22.334.000,00				12.170.750,00	26.800.800	Bapenda	Renja
															-	-		
6		Program Peningkatan Perencanaan SKPD			Terwujudnya Perencanaan SKPD Secara Optimal	100%					32.753.750,00				32.753.750	39.304.500		
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan	Terwujudnya optimalisasi perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan	32.753.750,00				32.753.750	39.304.500	Bapenda	Renja
											5.698.673.010,00				20.698.673.010,00	6.838.407.612,00		
7		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%									-	-		
	1	Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Aplikasi SIP-PBB	1 paket	Tersedianya Aplikasi SIP-PBB	1 paket	212.375.000,00				212.375.000	254.850.000	Bapenda	Renja
	2	Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tercapainya Penyelesaian Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah	1 Paket	Tercapainya Penyelesaian Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah	1 Paket	208.900.000,00				208.900.000	250.680.000	Bapenda	Renja
	3	Pengelolaan Pajak Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tertibnya pengelolaan pajak Daerah	Wajib Pajak di kabupaten Garut	Tertibnya pengelolaan pajak Daerah	Wajib Pajak di kabupaten Garut	315.245.000,00				315.245.000	378.294.000	Bapenda	Renja
	4	Penyediaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya DHKP	1 paket	Tersedianya DHKP	1 paket	182.450.000,00				182.450.000	218.940.000	Bapenda	Renja
	5	Penyediaan SPPT PBB P2	Sukagalih	Tarogong Kidul			Pengadministrasian PBB P2	Wajib Pajak di kabupaten Garut	Pengadministrasian PBB P2	Wajib Pajak di kabupaten Garut	187.450.000,00				187.450.000	224.940.000	Bapenda	Renja
	6	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Sukagalih	Tarogong Kidul			Basis Data PBB yang terbaru	Desa/Kelurahan	Basis Data PBB yang terbaru	Desa/Kelurahan	116.275.000,00				116.275.000	139.530.000	Bapenda	Renja
	7	Pemuktahiran Database Pajak Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tercapainya Tertib Administrasi Pajak Daerah	Desa/Kelurahan	Tercapainya Tertib Administrasi Pajak Daerah	Desa/Kelurahan	51.500.000,00				51.500.000	61.800.000	Bapenda	Renja
	8	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak	Sukagalih	Tarogong Kidul			Terlatihnya aparatur pengelola pajak	1 Paket	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur	1 paket	50.000.000,00				50.000.000	60.000.000	Bapenda	Renja

No	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan		Lokasi (Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan		Indikator Kinerja						Biaya (Rp)					Perkiraan Maju	Keterangan	
			Kel	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PH LN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Kategori Kegiatan
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	9	Pendataan Individual objek dan subyek PBB P2	Sukagalih	Tarogong Kidul			Terlaksanakannya perubahan data objek dan subyek PBB	Kegiatan	Meningkatnya Pendapatan dari sektor PBB	Kegiatan	66.050.000,00				66.050.000	79.260.000	Bapenda	Renja
	10	Intensifikasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Terlaksanakannya perubahan data objek dan subyek PBB	Kegiatan	Meningkatnya Pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah	Kegiatan	122.355.000,00				122.355.000	146.826.000	Bapenda	Renja
	11	Pendataan objek dan subjek PBB	Sukagalih	Tarogong Kidul			Terlaksanakannya perubahan data objek dan subyek PBB	Kegiatan	Meningkatnya Pendapatan dari sektor PBB	Kegiatan	450.000.000,00				450.000.000	540.000.000	Bapenda	Renja
	12	Penyediaan peralatan cetak PBB (Mesin Printonik)	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya mesin pencetak form PBB	2 Unit	Meningkatnya kecepatan cetak Sarana PBB	2 Unit	400.000.000,00				400.000.000	480.000.000	Bapenda	Renja
	13	Penyediaan Meteran air tanah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Meteran air tanah	40 Unit	Meningkatnya penerimaan dari sektor pajak air tanah	40 Unit	518.695.510,00				518.695.510	622.434.612	Bapenda	Renja
	14	Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	Sukagalih	Tarogong Kidul			Sarana administrasi PBB dan BPHTB	Kecamatan Desa Kelurahan 1.300.000 Objek Pajak	Sarana administrasi PBB dan BPHTB	12 bulan	200.859.050,00				200.859.050	241.030.860	Bapenda	Renja
	15	Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB	Sukagalih	Tarogong Kidul			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran PBB dan BPHTB	42 Kecamatan dan 442 Desa	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran PBB dan BPHTB	42 Kecamatan dan 442 Desa	387.875.200,00				387.875.200	465.450.240	Bapenda	Renja
	16	Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP	Sukagalih	Tarogong Kidul			Perjalanan Penyampaian DPPT dan DHKP	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	Perjalanan Penyampaian DPPT dan DHKP	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayara n PBB	100.000.000,00				100.000.000	120.000.000	Bapenda	Renja
	17	Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Terlaksana Sistem Penagihan Yang Optimal Sesuai Ketentuan	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	Terlaksana Sistem Penagihan Yang Optimal Sesuai Ketentuan	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayara n PBB	174.895.230,00				174.895.230	209.874.276	Bapenda	Renja
	18	Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Daerah Secara Langsung	1 kegiatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Daerah Secara Langsung	1 kegiatan	308.592.000,00				308.592.000	370.310.400	Bapenda	Renja
	19	Penertiban Pajak Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tertibnya Pajak Daerah	80% dari Target Pencapaian	Tertibnya Pajak Daerah	80% dari Target Pencapaian	301.762.000,00				301.762.000	362.114.400	Bapenda	Renja

No	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan		Lokasi (Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Desa/Kelurahan)		Indikator Kinerja						Biaya (Rp)					Perkiraan Maju	Keterangan	
			Kel	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PH LN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Kategori Kegiatan
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	20	Pengawasan Pajak Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Pra Pemeriksaan Lapangan untuk Pelanggaran dan Pengajuan Keberatan	Data Hasil Pemeriksaan Lapangan	Pra Pemeriksaan Lapangan untuk Pelanggaran dan Pengajuan Keberatan	Data Hasil Pemeriksa an Lapangan	226.732.000,00				226.732.000	272.078.400	Bapenda	Renja
	21	Peningkatan Pelayanan dan hadiah bagi Pembayar Pajak Daerah (Pelayan Ibadah)	Sukagalih	Tarogong Kidul			Peningkatan Pendapatan Daerah	1 kegiatan	Peningkatan Pendapatan daerah	1 kegiatan	233.256.000,00				233.256.000	279.907.200	Bapenda	Renja
	129	Pemberian penghargaan kepada kecamatan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pencapaian Target PBB	Sukagalih	Tarogong Kidul			Peningkatan Kinerja Pemungut PBB	Desa/Kecamatan	Peningkatan Kinerja Pemungut PBB	1 Paket	500.000.000,00				500.000.000,00	600.000.000,00	Bapenda	Renja
	21	Rekonsiliasi dana bagi hasil	Sukagalih	Tarogong Kidul			tersedianya data rekon dana bagi hasil	dokumen	Meningkatnya akurasi data rekon bagi hasil	dokumen	45.000.000,00				45.000.000	54.000.000	Bapenda	Renja
	22	Pengelolaan pembukuan dan pelaporan	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya dokumen pembukuan dan pelaporan	dokumen	Tertibnya dokumen pembukuan dan laporan	dokumen	52.000.000,00				52.000.000	62.400.000	Bapenda	Renja
	23	Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya laporan pajak daerah dan retribusi daerah	dokumen	Tertibnya dokumen pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah	dokumen	91.400.000,00				91.400.000	109.680.000	Bapenda	Renja
	24	Evaluasi pendapatan daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedinya dokumen evaluasi pendapatan	dokumen	Peningkatan pendapatan daerah	dokumen	124.450.000,00				124.450.000	149.340.000	Bapenda	Renja
	25	Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya dokumen Rekon pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	dokumen	Tertibnya data pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	dokumen	155.000.000,00				155.000.000	186.000.000	Bapenda	Renja
	26	Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya dokumen laporan realisasi PBB dan BPHTB	dokumen	Tertibnya laporan realisasi PBB dan BPHTB	dokumen	92.150.000,00				92.150.000	110.580.000	Bapenda	Renja
	27	Pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Jasa Konsultan perencanaan pajak daerah	1 paket	Terwujudnya dokumen pengelolaan pajak dan retribusi daerah	1 paket	100.820.000,00				100.820.000	120.984.000	Bapenda	Renja
	28	Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya replikasi data	1 paket	Terpeliharanya jaringan aplikasi pendapatan daerah	1 paket	50.950.000,00				50.950.000	61.140.000	Bapenda	Renja
	29	Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya dokumen roadmap perencanaan Pajak dan retribusi daerah	1 paket	Meningkatnya Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	1 paket	71.870.000,00				71.870.000	86.244.000	Bapenda	Renja
	30	Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya peraturan peraturan pendapatan daerah	1 Paket	terwujudnya kepastian hukum pengelolaan pendapatan daerah	1 Paket	113.450.000,00				113.450.000	136.140.000	Bapenda	Renja

No	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan		Lokasi (Kabupaten/Kota/Kecamatan n/Desa/Kelurahan		Indikator Kinerja						Biaya (Rp)					Perkiraan Maju	Keterangan	
			Kel	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PH LN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Kategori Kegiatan
					Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	31	Koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan	Sukagalih	Tarogong Kidul			tersedianya data rekon pendapatan yang tertib	1 Paket	Peningkatan kualitas data pendapatan daerah	1 Paket	30.970.000,00				30.970.000	37.164.000	Bapenda	Renja
	32	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI	Sukagalih	Tarogong Kidul			Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Sistem	Peningkatan Pendapatan daerah	1 Sistem	248.500.000,00				248.500.000	298.200.000	Bapenda	Renja
	33	Penyediaan Aplikasi Pelaporan Pajak Online Sistem (POS)	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Tapping Box	1 Sistem	tercapainya akurasi pelaporan omset	1 Sistem	1.900.000.000,00				1.900.000.000	2.280.000.000	Bapenda	Renja
	34	Penyediaan aplikasi SPTPD Online	Sukagalih	Tarogong Kidul			Tersedianya Aplikasi SPTPD Online	1 Sistem	Terwujudnya pendataan pajak daerah yang cepat akuntabel	1 Sistem	132.000.000,00				132.000.000	158.400.000	Bapenda	Renja
	35	Penyampaian informasi Pajak Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Terwujudnya Efektifitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Wajib Pajak	Terwujudnya Efektifitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Wajib Pajak	71.350.000,00				71.350.000	85.620.000	Bapenda	Renja
	36	Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul			Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Sistem	Peningkatan Pendapatan daerah	1 Sistem	102.450.000,00				102.450.000	122.940.000	Bapenda	Renja
											8.697.626.990,00	15.000.000.000	-	-	8.697.626.990	10.437.152.388		
		Jumlah									14.396.300.000,00	15.000.000.000	-	-	29.396.300.000,00	17.275.560.000,00		

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017
KABUPATEN GARUT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7						
		URUSAN KEUANGAN									
		BIDANG URUSAN PENDAPATAN									
01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tersedianya Materai	3200 lembar	100%	3200 lembar	100%	100%	3200 lembar	3200 lembar	100%
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya data administrasi keuangan	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	100%	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa cleaning service	2 Paket	100%	2 Paket	100%	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai sarana penunjang administrasi perkantoran	1 Paket	100%	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak sebagai sarana penunjang administrasi perkantoran	1 Paket	100%	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	269 buah	100%	269 buah	100%	100%	269 buah	269 buah	100%
	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	9 buah	100%	9 buah	100%	100%	9 buah	9 buah	100%
	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran dan majalah sebagai media informasi	8406 exp	100%	8406 exp	100%	100%	8406 exp	8406 exp	100%
	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5824 dus	100%	5824 dus	100%	100%	5824 dus	5824 dus	100%
	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	100%	1 paket	100%	100%	1 paket	1 paket	100%
	019	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi/Teknis	Meningkatkan kinerja tenaga administrasi /teknis	12 orang	100%	12 orang	100%	100%	12 orang	12 orang	100%
	024	Penyediaan Jasa Pendukung Pelaksana Teknis Lainnya	Meningkatkan kinerja tenaga administrasi /teknis	9 orang	100%				9 orang	9 orang	100%
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur								
	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Tersedianya Ruang Yang Representatif	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	010	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meja kerja dan kursi kerja sebagai sarana penunjang aparatur	15 buah	100%	15 buah	100%	100%	15 buah	15 buah	100%
	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Perbaikan/ Pemeliharaan Gedung Kantor Secara Berkala	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%
03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur Pengelola Pajak								
	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya batik dinas	115 orang	100%	115 orang	100%	100%	115 orang	115 orang	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7						
08		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pengelola Pajak								
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur	3 orang	100%	3 orang	100%	100%	3 orang	3 orang	100%
06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
	01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
07		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD	Meningkatnya Perencanaan SKPD								
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya dan berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah								
		Bidang Pendataan									
	111	Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB	Tersedianya Aplikasi SIP-PBB	1 paket	100%	1 paket	100%	100%	1 paket	1 paket	100%
	063	Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Tercapainya Penyelesaian Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah	1 Paket	100%	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	064	Pengelolaan Pajak Daerah	Tertibnya pengelolaan pajak Daerah	Wajib Pajak di kabupaten Garut	100%	Wajib Pajak di kabupaten Garut	100%	100%	Wajib Pajak di kabupaten Garut	Wajib Pajak di kabupaten Garut	100%
	065	Penyediaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2	Tersedianya DHKP	1 paket	100%	1 paket	100%	100%	1 paket	1 paket	100%
	066	Penyediaan SPPT PBB P2	Pengadministrasian PBB P2	Wajib Pajak di kabupaten Garut	100%	Wajib Pajak di kabupaten Garut	100%	100%	Wajib Pajak di kabupaten Garut	Wajib Pajak di kabupaten Garut	100%
	040	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Basis Data PBB yang terbaru	Desa/Kelurahan	100%	Desa/Kelurahan	100%	100%	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	100%
	132	Pemuktahiran Database Pajak Daerah	Tercapainya Tertib Administrasi Pajak Daerah	Desa/Kelurahan	100%	Desa/Kelurahan	100%	100%	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	100%
	092	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak	Terlatihnya aparatur pengelola pajak	1 Paket	100%	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	093	Pendataan Individual objek dan subyek PBB P2	Terlaksanakannya perubahan data objek dan subyek PBB	Kegiatan	100%	Kegiatan	100%	100%	Kegiatan	Kegiatan	100%
	133	Intensifikasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Terlaksanakannya perubahan data objek dan subyek PBB	Kegiatan	100%	Kegiatan	100%	100%	Kegiatan	Kegiatan	100%
	134	Pendataan objek dan subjek PBB	Terlaksanakannya perubahan data objek dan subyek PBB	Kegiatan	100%	Kegiatan	100%	100%	Kegiatan	Kegiatan	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7						
		Bidang Penagihan									
	130	Penyediaan Sarana Penunjang Administrasi PBB	Sarana administrasi PBB dan BPHTB	Kecamatan Desa Kelurahan 1.300.000 Objek Pajak	100%	Kecamatan Desa Kelurahan 1.300.000 Objek Pajak	100%	100%	Kecamatan Desa Kelurahan 1.300.000 Objek Pajak	Kecamatan Desa Kelurahan 1.300.000 Objek Pajak	100%
	122	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi PBB dan BPHTB	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran PBB dan BPHTB	42 Kecamatan dan 442 Desa	100%	42 Kecamatan dan 442 Desa	100%	100%	42 Kecamatan dan 442 Desa	42 Kecamatan dan 442 Desa	100%
	049	Penyampaian Sarana Administrasi PBB,SPPT,dan DHKP	Perjalanan Penyampaian DPPT dan DHKP	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	100%	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	100%	100%	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	100%
	050	Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Terlaksana Sistem Penagihan Yang Optimal Sesuai Ketentuan	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	100%	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	100%	100%	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	100%
	051	Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Daerah Secara Langsung	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	054	Penertiban Pajak Daerah	Tertibnya Pajak Daerah	80% dari Target Pencapaian	100%	80% dari Target Pencapaian	100%	100%	80% dari Target Pencapaian	80% dari Target Pencapaian	100%
	055	Pengawasan Pajak Daerah	Pra Pemeriksaan Lapangan untuk Pelanggaran dan Pengajuan Keberatan	Data Hasil Pemeriksaan Lapangan	100%	Data Hasil Pemeriksaan Lapangan	100%	100%	Data Hasil Pemeriksaan Lapangan	Data Hasil Pemeriksaan Lapangan	100%
	120	Peningkatan Pelayanan dan Hadiah Bagi Pembayaran Pajak Daerah (Pelayanan Ibadah)	Peningkatan Pendapatan Daerah	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	129	Cleansing Data Piutang Pajak PBB P2	Terhapusnya piutang PBB	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	49	Pemberian penghargaan kepada kecamatan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pencapaian Target PBB	Peningkatan Kinerja Pemungut PBB			Desa penerima penghargaan	100%	100%	Desa penerima penghargaan	Desa penerima penghargaan	100%
		Bidang Akuntansi									
	110	Rekonsiliasi dana bagi hasil	tersedianya data rekon dana bagi hasil	1 Dokumen	100%				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	103	Pengelolaan pembukuan dan pelaporan	Tersedianya dokumen pembukuan dan pelaporan	1 Dokumen	100%				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	127	Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah	Tersedianya laporan pajak daerah dan retribusi daerah	1 Dokumen	100%				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	098	Evaluasi pendapatan daerah	Tersedinya dokumen evaluasi pendapatan	1 Dokumen	100%				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7						
	099	Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Tersedianya dokumen Rekon pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	1 Dokumen	100%				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	128	Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB	Tersedianya dokumen laporan realisasi PBB dan BPHTB	1 Dokumen	100%				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Bidang Pengembangan dan Kerjasama									
	114	Pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Jasa Konsultan perencana pajak daerah	1 Dokumen	100%				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	115	Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah	Tersedianya replikasi data	1 Dokumen	100%				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	116	Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya dokumen roadmap perencanaan Pajak dan retribusi daerah	1 Paket	100%				1 Paket	1 Paket	100%
	118	Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Tersedianya peraturan peraturan pendapatan daerah	1 Paket	100%				1 Paket	1 Paket	100%
	119	Koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan	tersedianya data rekon pendapatan yang tertib	1 Paket	100%				1 Paket	1 Paket	100%
	135	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI	Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Paket	100%				1 Paket	1 Paket	100%
	136	Penyampaian informasi Pajak Daerah	Terwujudnya Efektifitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	1 Paket	100%				1 Paket	1 Paket	100%
	137	Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Paket	100%				1 Paket	1 Paket	100%

Tabel 2.4
Review Rancangan Awal RKPD
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.536.378.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.536.378.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	Tersedianya Materai	1750 lembar dan 1500 lembar	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	Tersedianya Materai	1750 lembar dan 1500 lembar	15.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bln	90.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bln	90.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bapenda	Tersedianya data administrasi keuangan	Dokumen	107.006.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bapenda	Tersedianya data administrasi keuangan	Dokumen	107.006.000,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bapenda	Tersedianya jasa cleaning service	1 paket	18.950.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bapenda	Tersedianya jasa cleaning service	1 paket	18.950.000,00	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bapenda	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	25 Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bapenda	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	25 Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bapenda	Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai sarana penunjang administrasi perkantoran	1 paket	201.640.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bapenda	Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai sarana penunjang administrasi perkantoran	1 paket	201.640.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Tersedianya Barang Cetak sebagai sarana penunjang administrasi perkantoran	1 paket dan 176000 lbr	110.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Tersedianya Barang Cetak sebagai sarana penunjang administrasi perkantoran	1 paket dan 176000 lbr	110.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	316 Buah	25.180.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	316 Buah	25.180.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket dan 16 Unit	500.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket dan 16 Unit	500.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Tersedianya Koran dan majalah sebagai media informasi	koran dan majalah	27.252.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Tersedianya Koran dan majalah sebagai media informasi	koran dan majalah	27.252.000,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bapenda	Tersedianya makanan dan minuman	1 paket	163.950.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bapenda	Tersedianya makanan dan minuman	1 paket	163.950.000,00	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bapenda	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	160.000.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bapenda	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	160.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis	Bapenda	Meningkatkan kinerja tenaga administrasi /teknis	12 Orang	62.400.000,00	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis	Bapenda	Meningkatkan kinerja tenaga administrasi /teknis	12 Orang	62.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis lainnya	Bapenda	Meningkatkan kinerja tenaga administrasi /teknis	9 Orang	45.000.000,00	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis lainnya	Bapenda	Meningkatkan kinerja tenaga administrasi /teknis	9 Orang	45.000.000,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				18.789.357.260,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				18.789.357.260,00	

[illegible]

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				250.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				250.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bapenda	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur	1 Paket	250.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bapenda	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur	1 Paket	250.000.000,00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				22.334.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				22.334.000,00	
	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja SKPD	Bapenda	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1 Paket	22.334.000,00	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja SKPD	Bapenda	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1 Paket	22.334.000,00	
	Program Peningkatan Perencanaan SKPD				32.753.750,00	Program Peningkatan Perencanaan SKPD				32.753.750,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bapenda	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan	32.753.750,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bapenda	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan	32.753.750,00	
					20.698.673.010,00					20.698.673.010,00	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				8.697.626.990,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				8.697.626.990,00	
	Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB	Bapenda	Tersedianya Aplikasi SIP-PBB	1 paket	212.375.000,00	Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB	Bapenda	Tersedianya Aplikasi SIP-PBB	1 paket	212.375.000,00	
	Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Bapenda	Tercapainya Penyelesaian Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah	1 Paket	208.900.000,00	Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Bapenda	Tercapainya Penyelesaian Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah	1 Paket	208.900.000,00	

[illegible]

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	Bapenda	Sarana administrasi PBB dan BPHTB	Kecamatan Desa Kelurahan 1.300.000 Objek Pajak	200.859.050,00	Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	Bapenda	Sarana administrasi PBB dan BPHTB	Kecamatan Desa Kelurahan 1.300.000 Objek Pajak	200.859.050,00	
	Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB	Bapenda	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran PBB dan BPHTB	42 Kecamatan dan 442 Desa	387.875.200,00	Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB	Bapenda	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran PBB dan BPHTB	42 Kecamatan dan 442 Desa	387.875.200,00	
	Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP	Bapenda	Perjalanan Penyampaian DPPT dan DHKP	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	100.000.000,00	Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP	Bapenda	Perjalanan Penyampaian DPPT dan DHKP	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	100.000.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Bapenda	Terlaksana Sistem Penagihan Yang Optimal Sesuai Ketentuan	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	174.895.230,00	Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Bapenda	Terlaksana Sistem Penagihan Yang Optimal Sesuai Ketentuan	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	174.895.230,00	
	Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	Bapenda	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Daerah Secara Langsung	1 kegiatan	308.592.000,00	Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	Bapenda	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Daerah Secara Langsung	1 kegiatan	308.592.000,00	
	Penertiban Pajak Daerah	Bapenda	Tertibnya Pajak Daerah	80% dari Target Pencapaian	301.762.000,00	Penertiban Pajak Daerah	Bapenda	Tertibnya Pajak Daerah	80% dari Target Pencapaian	301.762.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Pra Pemeriksaan Lapangan untuk Pelanggaran dan Pengajuan Keberatan	Data Hasil Pemeriksaan Lapangan	226.732.000,00	Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Pra Pemeriksaan Lapangan untuk Pelanggaran dan Pengajuan Keberatan	Data Hasil Pemeriksaan Lapangan	226.732.000,00	
	Peningkatan Pelayanan dan hadiah bagi Pembayar Pajak Daerah (Pelayan Ibadah)	Bapenda	Peningkatan Pendapatan Daerah	1 kegiatan	233.256.000,00	Peningkatan Pelayanan dan hadiah bagi Pembayar Pajak Daerah (Pelayan Ibadah)	Bapenda	Peningkatan Pendapatan Daerah	1 kegiatan	233.256.000,00	
	Pemberian penghargaan kepada kecamatan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pencapaian Target PBB	Bapenda	Peningkatan Kinerja Pemungut PBB	1 Paket	500.000.000,00	Pemberian penghargaan kepada kecamatan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pencapaian Target PBB	Bapenda	Peningkatan Kinerja Pemungut PBB	1 Paket	500.000.000,00	
	Rekonsiliasi dana bagi hasil	Bapenda	tersedianya data rekon dana bagi hasil	dokumen	45.000.000,00	Rekonsiliasi dana bagi hasil	Bapenda	tersedianya data rekon dana bagi hasil	dokumen	45.000.000,00	
	Pengelolaan pembukuan dan pelaporan	Bapenda	Tersedianya dokumen pembukuan dan pelaporan	dokumen	52.000.000,00	Pengelolaan pembukuan dan pelaporan	Bapenda	Tersedianya dokumen pembukuan dan pelaporan	dokumen	52.000.000,00	
	Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah	Bapenda	Tersedianya laporan pajak daerah dan retribusi daerah	dokumen	91.400.000,00	Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah	Bapenda	Tersedianya laporan pajak daerah dan retribusi daerah	dokumen	91.400.000,00	
	Evaluasi pendapatan daerah	Bapenda	Tersedinya dokumen evaluasi pendapatan	dokumen	124.450.000,00	Evaluasi pendapatan daerah	Bapenda	Tersedinya dokumen evaluasi pendapatan	dokumen	124.450.000,00	
	Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Bapenda	Tersedianya dokumen Rekon pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	dokumen	155.000.000,00	Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Bapenda	Tersedianya dokumen Rekon pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	dokumen	155.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB	Bapenda	Tersedianya dokumen laporan realisasi PBB dan BPHTB	dokumen	92.150.000,00	Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB	Bapenda	Tersedianya dokumen laporan realisasi PBB dan BPHTB	dokumen	92.150.000,00	
	Pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Bapenda	Jasa Konsultan perencana pajak daerah	1 paket	100.820.000,00	Pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Bapenda	Jasa Konsultan perencana pajak daerah	1 paket	100.820.000,00	
	Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah	Bapenda	Tersedianya replikasi data	1 paket	50.950.000,00	Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah	Bapenda	Tersedianya replikasi data	1 paket	50.950.000,00	
	Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	Tersedianya dokumen roadmap perencanaan Pajak dan retribusi daerah	1 paket	71.870.000,00	Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	Tersedianya dokumen roadmap perencanaan Pajak dan retribusi daerah	1 paket	71.870.000,00	
	Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Bapenda	Tersedianya peraturan peraturan pendapatan daerah	1 Paket	113.450.000,00	Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Bapenda	Tersedianya peraturan peraturan pendapatan daerah	1 Paket	113.450.000,00	
	Koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan	Bapenda	tersedianya data rekon pendapatan yang tertib	1 Paket	30.970.000,00	Koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan	Bapenda	tersedianya data rekon pendapatan yang tertib	1 Paket	30.970.000,00	
	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI	Bapenda	Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Sistem	248.500.000,00	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI	Bapenda	Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Sistem	248.500.000,00	
	Penyediaan Aplikasi Pelaporan Pajak Online Sistem (POS)	Bapenda	Tersedianya Tapping Box	1 Sistem	1.900.000.000,00	Penyediaan Aplikasi Pelaporan Pajak Online Sistem (POS)	Bapenda	Tersedianya Tapping Box	1 Sistem	1.900.000.000,00	
	Penyediaan aplikasi SPTPD Online	Bapenda	Tersedianya Aplikasi SPTPD Online	1 Sistem	132.000.000,00	Penyediaan aplikasi SPTPD Online	Bapenda	Tersedianya Aplikasi SPTPD Online	1 Sistem	132.000.000,00	
	Penyampaian informasi Pajak Daerah	Bapenda	Terwujudnya Efektifitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Wajib Pajak	71.350.000,00	Penyampaian informasi Pajak Daerah	Bapenda	Terwujudnya Efektifitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Wajib Pajak	71.350.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Sistem	102.450.000,00	Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Sistem	102.450.000,00	
T O T A L					29.396.300.000,00					29.396.300.000,00	

KODE				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				18.789.357.260,00				4.547.228.712,00
				Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan kantor dan pelayanan yang representatif	Bapenda	1 Unit	15.000.000.000,00	APBD Prov. Jawa Barat		1 Unit	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasioanal	Bapenda	2 unit dan 10 Unit	750.000.000,00	APBD Kab. Garut		2 unit dan 10 Unit	900.000.000,00
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Ruangan Yang Representatif	Bapenda	1 paket	151.200.000,00	APBD Kab. Garut		1 paket	181.440.000,00
				Pengadaan Mebeulair	Tersedianya meja kerja dan kursi kerja sebagai sarana penunjang aparatur	Bapenda	2 paket	269.017.260,00	APBD Kab. Garut		2 paket	322.820.712,00
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Perbaikan/ Pemeliharaan Gedung Kantor Secara Berkala	Bapenda	1 Paket	30.000.000,00	APBD Kab. Garut		1 Paket	36.000.000,00
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasioanal yang siap pakai	Bapenda	12 bulan	89.140.000,00	APBD Kab. Garut		12 bulan	106.968.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya fasilitas perbaikan/ rehabilitasi geudng kantor	Bapenda	12 bulan	2.500.000.000,00	APBD Kab. Garut		12 bulan	3.000.000.000,00
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Bapenda		67.850.000,00	APBD Kab. Garut			81.420.000,00
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Bapenda	1 Paket	35.000.000,00	APBD Kab. Garut		1 Paket	42.000.000,00
				Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Tersedianya batik dinas	Bapenda	1 Paket	32.850.000,00	APBD Kab. Garut		1 Paket	39.420.000,00
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				250.000.000,00				300.000.000,00
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Bapenda	1 Paket	250.000.000,00	APBD Kab. Garut		1 Paket	300.000.000,00
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				22.334.000,00				26.800.800,00
				Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Bapenda	1 Paket	22.334.000,00	APBD Kab. Garut		1 Paket	26.800.800,00
				Program Peningkatan Perencanaan SKPD				32.753.750,00				39.304.500,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	Bapenda	Dokumen Perencanaan	32.753.750,00	APBD Kab. Garut		Dokumen Perencanaan	39.304.500,00
								20.698.673.010,00				6.838.407.612,00
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				8.697.626.990,00				10.437.152.388,00
				Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB	Tersedianya Aplikasi SIP-PBB	Bapenda	1 paket	212.375.000,00	APBD Kab. Garut		1 paket	254.850.000,00
				Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Tercapainya Penyelesaian Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah	Bapenda	1 Paket	208.900.000,00	APBD Kab. Garut		1 Paket	250.680.000,00

KODE				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pajak Daerah	Tertibnya pengelolaan pajak Daerah	Bapenda	Wajib Pajak di kabupaten Garut	315.245.000,00	APBD Kab. Garut		Wajib Pajak di kabupaten Garut	378.294.000,00
				Penyediaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2	Tersedianya DHKP	Bapenda	1 paket	182.450.000,00	APBD Kab. Garut		1 paket	218.940.000,00
				Penyediaan SPPT PBB P2	Pengadministrasian PBB P2	Bapenda	Wajib Pajak di kabupaten Garut	187.450.000,00	APBD Kab. Garut		Wajib Pajak di kabupaten Garut	224.940.000,00
				Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Basis Data PBB yang terbaru	Bapenda	Desa/Kelurahan	116.275.000,00	APBD Kab. Garut		Desa/Kelurahan	139.530.000,00
				Pemuktahiran Database Pajak Daerah	Tercapainya Tertib Administrasi Pajak Daerah	Bapenda	Desa/Kelurahan	51.500.000,00	APBD Kab. Garut		Desa/Kelurahan	61.800.000,00
				Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak	Terlatihnya aparatur pengelola pajak	Bapenda	1 Paket	50.000.000,00	APBD Kab. Garut		1 Paket	60.000.000,00
				Pendataan Individual objek dan subyek PBB P2	Terlaksanakannya perubahan data objek dan subyek PBB	Bapenda	Kegiatan	66.050.000,00	APBD Kab. Garut		Kegiatan	79.260.000,00
				Intensifikasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Terlaksanakannya perubahan data objek dan subyek PBB	Bapenda	Kegiatan	122.355.000,00	APBD Kab. Garut		Kegiatan	146.826.000,00
				Pendataan objek dan subjek PBB	Terlaksanakannya perubahan data objek dan subyek PBB	Bapenda	Kegiatan	450.000.000,00	APBD Kab. Garut		Kegiatan	540.000.000,00
				Penyediaan peralatan cetak PBB (Mesin Printonik)	Tersedianya mesin pencetak form PBB	Bapenda	2 Unit	400.000.000,00	APBD Kab. Garut		2 Unit	480.000.000,00
				Penyediaan Meteran air tanah	Tersedianya Meteran air tanah	Bapenda	40 Unit	518.695.510,00	APBD Kab. Garut		40 Unit	622.434.612,00
				Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	Sarana administrasi PBB dan BPHTB	Bapenda	Kecamatan Desa Kelurahan 1.300.000 Objek Pajak	200.859.050,00	APBD Kab. Garut		Kecamatan Desa Kelurahan 1.300.000 Objek Pajak	241.030.860,00
				Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran PBB dan BPHTB	Bapenda	42 Kecamatan dan 442 Desa	387.875.200,00	APBD Kab. Garut		42 Kecamatan dan 442 Desa	465.450.240,00
				Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP	Perjalanan Penyampaian DPPT dan DHKP	Bapenda	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	100.000.000,00	APBD Kab. Garut		42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	120.000.000,00
				Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Terlaksana Sistem Penagihan Yang Optimal Sesuai Ketentuan	Bapenda	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	174.895.230,00	APBD Kab. Garut		42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	209.874.276,00
				Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Daerah Secara Langsung	Bapenda	1 kegiatan	308.592.000,00	APBD Kab. Garut		1 kegiatan	370.310.400,00

KODE				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penertiban Pajak Daerah	Tertibnya Pajak Daerah	Bapenda	80% dari Target Pencapaian	301.762.000,00	APBD Kab. Garut		80% dari Target Pencapaian	362.114.400,00
				Pengawasan Pajak Daerah	Pra Pemeriksaan Lapangan untuk Pelanggaran dan Pengajuan Keberatan	Bapenda	Data Hasil Pemeriksaan Lapangan	226.732.000,00	APBD Kab. Garut		Data Hasil Pemeriksaan Lapangan	272.078.400,00
				Peningkatan Pelayanan dan hadiah bagi Pembayar Pajak Daerah (Pelayan Ibadah)	Peningkatan Pendapatan Daerah	Bapenda	1 kegiatan	233.256.000,00	APBD Kab. Garut		1 kegiatan	279.907.200,00
				Pemberian penghargaan kepada kecamatan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pencapaian Target PBB	Peningkatan Kinerja Pemungut PBB	Bapenda	Desa/Kecamatan	500.000.000,00	APBD Kab. Garut		Desa/Kecamatan	600.000.000,00
				Rekonsiliasi dana bagi hasil	tersedianya data rekon dana bagi hasil	Bapenda	dokumen	45.000.000,00	APBD Kab. Garut		dokumen	54.000.000,00
				Pengelolaan pembukuan dan pelaporan	Tersedianya dokumen pembukuan dan pelaporan	Bapenda	dokumen	52.000.000,00	APBD Kab. Garut		dokumen	62.400.000,00
				Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah	Tersedianya laporan pajak daerah dan retribusi daerah	Bapenda	dokumen	91.400.000,00	APBD Kab. Garut		dokumen	109.680.000,00
				Evaluasi pendapatan daerah	Tersedinya dokumen evaluasi pendapatan	Bapenda	dokumen	124.450.000,00	APBD Kab. Garut		dokumen	149.340.000,00
				Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Tersedianya dokumen Rekon pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Bapenda	dokumen	155.000.000,00	APBD Kab. Garut		dokumen	186.000.000,00
				Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB	Tersedianya dokumen laporan realisasi PBB dan BPHTB	Bapenda	dokumen	92.150.000,00	APBD Kab. Garut		dokumen	110.580.000,00
				Pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Jasa Konsultan perencana pajak daerah	Bapenda	1 paket	100.820.000,00	APBD Kab. Garut		1 paket	120.984.000,00
				Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah	Tersedianya replikasi data	Bapenda	1 paket	50.950.000,00	APBD Kab. Garut		1 paket	61.140.000,00
				Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya dokumen roadmap perencanaan Pajak dan retribusi daerah	Bapenda	1 paket	71.870.000,00	APBD Kab. Garut		1 paket	86.244.000,00
				Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Tersedianya peraturan peraturan pendapatan daerah	Bapenda	1 Paket	113.450.000,00	APBD Kab. Garut		1 Paket	136.140.000,00
				Koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan	tersedianya data rekon pendapatan yang tertib	Bapenda	1 Paket	30.970.000,00	APBD Kab. Garut		1 Paket	37.164.000,00
				Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI	Peningkatan Pendapatan Daerah	Bapenda	1 Sistem	248.500.000,00	APBD Kab. Garut		1 Sistem	298.200.000,00
				Penyediaan Aplikasi Pelaporan Pajak Online Sistem (POS)	Tersedianya Tapping Box	Bapenda	1 Sistem	1.900.000.000,00	APBD Kab. Garut		1 Sistem	2.280.000.000,00
				Penyediaan aplikasi SPTPD Online	Tersedianya Aplikasi SPTPD Online	Bapenda	1 Sistem	132.000.000,00	APBD Kab. Garut		1 Sistem	158.400.000,00

KODE				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyampaian informasi Pajak Daerah	Terwujudnya Efektifitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Wajib Pajak	71.350.000,00	APBD Kab. Garut		Wajib Pajak	85.620.000,00
				Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	Bapenda	1 Sistem	102.450.000,00	APBD Kab. Garut		1 Sistem	122.940.000,00
T O T A L								29.396.300.000,00				17.275.560.000,00

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	KODE	JENIS PAJAK DAERAH	SKPD PENGOLA	ANGGARAN TA 2016		%	ANGGARAN TA 2017		%	PENAMBAHAN	PROYEKSI TAHUN	KETERANGAN
				APBD	REALISASI		MURNI	PERUBAHAN			ANGGARAN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
	4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		84.263.693.608,00	83.398.777.015,00		110.476.840.367,29	110.476.840.367,29		9.158.530.068,71	119.635.370.436,00	
1	4.1.1.01	Pajak Hotel	BAPENDA	7.190.000.000,00	7.363.636.722,00	102,41%	12.603.092.015,00	8.000.000.000,00	8,29%	663.200.000,00	8.663.200.000,00	
2	4.1.1.02	Pajak Restoran	BAPENDA	9.700.000.000,00	10.288.435.756,00	106,07%	15.077.152.852,00	11.500.000.000,00	8,29%	953.350.000,00	12.453.350.000,00	
3	4.1.1.03	Pajak Hiburan	BAPENDA	2.120.000.000,00	2.219.966.395,00	104,72%	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	8,29%	207.250.000,00	2.707.250.000,00	
4	4.1.1.04	Pajak Reklame	BAPENDA	3.430.000.000,00	3.604.299.409,00	105,08%	4.667.139.633,00	4.200.000.000,00	8,29%	348.180.000,00	4.548.180.000,00	
5	4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	BAPENDA	21.440.000.000,00	21.444.796.016,00	100,02%	22.987.630.227,29	25.987.630.227,29	8,29%	2.154.374.546,71	28.142.004.774,00	
6	4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	BAPENDA	2.124.000.000,00	2.513.569.306,00	118,34%	2.800.000.000,00	2.850.000.000,00	8,29%	236.265.000,00	3.086.265.000,00	
7	4.1.1.07	Pajak Parkir	BAPENDA	195.000.000,00	204.056.920,00	104,64%	350.000.000,00	350.000.000,00	8,29%	29.015.000,00	379.015.000,00	
8	4.1.1.08	Pajak Air Tanah	BAPENDA	2.100.000.000,00	1.146.465.633,00	54,59%	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	8,29%	331.600.000,00	4.331.600.000,00	
9	4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	BAPENDA	10.000.000,00	10.002.000,00	100,02%	8.180.000,00	10.780.000,00	8,29%	893.662,00	11.673.662,00	
10	4.1.1.12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	BAPENDA	10.368.915.508,00	8.454.564.884,00	81,54%	13.472.851.184,00	15.472.851.184,00	8,29%	1.282.699.364,00	16.755.550.548,00	
11		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	BAPENDA	25.585.778.100,00	26.148.983.974,00	102,20%	32.010.794.456,00	35.605.578.956,00	8,29%	2.951.702.496,00	38.557.281.452,00	
		J U M L A H		84.263.693.608,00	83.398.777.015,00		110.476.840.367,29	110.476.840.367,29		9.158.530.068,71	119.635.370.436,00	
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
	4.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah		15.625.396.964,25	17.889.439.363,00		17.226.742.290,00	16.674.153.349,00		1.504.352.887,06	18.178.506.206,06	
		Retribusi Jasa Umum										
1	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	294.500.000,00	309.364.000,00	105,05%	323.950.000,00	323.950.000,00	8,29%	26.855.455,00	350.805.455,00	
2	4.1.2.01.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan/Jalan	DINAS PUPR	25.840.241,00	26.555.000,00	102,77%	323.444.100,00	25.840.241,00	8,29%	2.142.156,00	27.982.397,00	Salah infut pagu murni 2017 seharusnya Rp. 25.840.241
3	4.1.2.01.01	Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	DLHKP	10.237.279,00	10.300.000,00	100,61%	12.550.000,00	12.550.000,00	8,29%	1.040.395,00	13.590.395,00	
4	4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Pengangkutan Persampahan/Kebersihan	DLHKP	337.514.301,00	326.126.000,00	96,63%	387.020.000,00	387.020.000,00	8,29%	32.083.958,00	419.103.958,00	
5	4.1.2.01.02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan / atau Lokasi	DLHKP	372.744.000,00	371.496.600,00	99,67%	397.584.000,00	397.584.000,00	8,29%	32.959.713,06	430.543.713,06	Belum ada Mou penyerahan dari Disperindag ke DLHKP
6	4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman atau Pembakaran / Pengubuan Mayat	DLHKP	6.862.980,00	6.870.000,00	100,10%	8.000.000,00	8.000.000,00	8,29%	663.200,00	8.663.200,00	

NO.	KODE	JENIS PAJAK DAERAH	SKPD PENGOLA	ANGGARAN TA 2016		%	ANGGARAN TA 2017		%	PENAMBAHAN	PROYEKSI TAHUN	KETERANGAN
				APBD	REALISASI		MURNI	PERUBAHAN			ANGGARAN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB	973.823.744,72	736.074.000,00	75,59%	1.032.253.000,00	1.150.000.000,00	8,29%	95.335.000,00	1.245.335.000,00	
8	4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar/Kios	DISPERINDAG	836.061.200,00	862.162.100,00	103,12%	1.108.839.600,00	1.108.839.600,00	20,00%	221.767.920,00	1.330.607.520,00	
9	4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	DINAS DAMKAR	3.145.532,50	3.150.000,00	100,14%	3.460.086,00	3.633.000,00	10,00%	363.300,00	3.996.300,00	
10	4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	DINAS PUPR	34.314.900,00	39.000.000,00	113,65%	37.746.390,00	37.746.390,00	8,29%	3.129.176,00	40.875.566,00	
11	4.1.2.01.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS PUPR	801.750.000,00	-	0,00%	881.925.000,00	881.925.000,00	8,29%	73.111.583,00	955.036.583,00	
		Retribusi Jasa Usaha										
12	4.1.2.02.01.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKAD	528.766.000,00	901.186.800,00	170,43%	263.916.640,00	263.916.640,00	24,83%	65.524.112,00	329.440.752,00	
13	4.1.2.02.01.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan/Irigasi	DINAS PUPR	89.543.299,00	89.656.006,00	100,13%	93.125.030,00	93.125.030,00	8,29%	7.720.065,00	100.845.095,00	
14	4.1.2.02.01.02	Sewa Alat Berat	DINAS PUPR	228.997.995,00	261.520.000,00	114,20%	42.822.000,00	160.000.000,00	8,29%	13.264.000,00	173.264.000,00	
15	4.1.2.02.01.03	Sewa Gedung / Ruang / Aula dan Asrama	DISBUDPAR	68.629.800,00	1.500.000,00	2,19%	75.000.000,00	75.000.000,00	8,29%	6.217.500,00	81.217.500,00	
16	4.1.2.02.01.04	Laboratorium	DINAS PUPR	31.165.707,00	31.360.000,00	100,69%	39.123.700,00	39.123.700,00	8,29%	3.243.355,00	42.367.055,00	
17	4.1.2.02.04	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	DISHUB	830.192.081,25	553.831.000,00	66,71%	954.432.414,00	255.000.000,00	8,29%	21.139.500,00	276.139.500,00	
18	4.1.2.02.05	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	DISHUB	46.420.042,20	43.198.000,00	93,05%	75.737.000,00	205.000.000,00	8,29%	16.994.500,00	221.994.500,00	
19	4.1.2.02.06	Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	DISBUDPAR	1.568.749.140,00	1.568.880.000,00	100,01%	1.725.624.054,00	1.725.624.054,00	8,29%	143.054.234,00	1.868.678.288,00	
20	4.1.2.02.08	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pasar Hewan)	DISNAK	35.567.000,00	35.905.000,00	100,95%	45.172.000,00	45.172.000,00	15%	6.775.800,00	51.947.800,00	
21	4.1.2.02.08	Rumah potong hewan	DISNAK	93.909.750,00	48.342.500,00	51,48%	71.517.000,00	71.517.000,00	9,90%	7.080.183,00	78.597.183,00	
22	4.1.2.02.10	Pelayanan Tempat Rekreasi	DISBUDPAR	351.727.725,00	469.446.000,00	133,47%	387.436.400,00	387.436.400,00	8,29%	32.118.478,00	419.554.848,00	
23	4.1.2.02.10	Pelayanan Tempat Olahraga	DISPORA	495.735.922,00	324.958.500,00	65,55%	545.309.591,00	545.309.591,00		0,00	545.309.591,00	65.437.151,00
24	4.1.2.02.13	Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah (BBI)	DISNAK	32.057.500,00	32.431.300,00	101,17%	61.000.000,00	61.000.000,00	8,50%	5.185.000,00	66.185.000,00	
		Retribusi Perizinan Tertentu										
25	4.1.2.03.01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	DINAS PUPR	5.500.000.000,00	8.624.366.702,00	156,81%	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00	8,29%	501.545.000,00	6.551.545.000,00	
26	4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan	DISPERINDAG	436.118.400,00	625.499.775,00	143,42%	523.343.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Ditutup dari bulan April 2017 sesuai dg Permendagri No.19 Th. 2017 tentang "Kewenangan"
27	4.1.2.03.04	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB	1.175.900.000,00	1.208.435.400,00	102,77%	1.158.180.000,00	1.530.000.000,00	8,29%	126.837.000,00	1.656.837.000,00	
28	4.1.2.03.04	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	DISHUB	194.685.583,42	163.836.780,00	84,15%	200.331.285,00	280.933.699,00	8,29%	23.289.404,00	304.223.103,00	
29	4.1.2.03.05	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan	DISNAK	500.000,00	100.000,00	20,00%	500.000,00	500.000,00		41.450,00	541.450,00	

NO.	KODE	JENIS PAJAK DAERAH	SKPD PENGOLA	ANGGARAN TA 2016		%	ANGGARAN TA 2017		%	PENAMBAHAN	PROYEKSI TAHUN	KETERANGAN
				APBD	REALISASI		MURNI	PERUBAHAN			ANGGARAN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mmepkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	DISNAKER	-	-	0,00%	234.000.000,00	234.000.000,00	8,29%	19.398.600,00	253.398.600,00	
31	4.1.2.25.01	Hasil Penjualan Hasil Pertanian	TPH	70.000.000,00	70.400.000,00	100,57%	163.400.000,00	163.400.000,00	8,29%	13.545.860,00	176.945.860,00	
32	4.1.4	Laain-lain PAD yang sah	DISPERINDAG									
33	4.1.4.01	Cicilan Kios	DISPERINDAG	108.185.337,16	143.487.900,00	132,63%		108.185.004,00	0,00%	0,00	108.185.004,00	
34	4.1.4.01	Kekayaan Daerah (MCK)	DISPERINDAG	41.751.504,00	-	0,00%		42.822.000,00	4,50%	1.926.990,00	44.748.990,00	
		J U M L A H		15.625.396.964,25	17.889.439.363,00		17.226.742.290,00	16.674.153.349,00		1.504.352.887,06	18.178.506.206,06	

Garut, 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT

U. BASUKI EKO, SH., MH
NIP. 19661230 199703 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2018

Organisasi / SKPD : 4.03.02. -BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD		
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)	
						Keluaran	Hasil			
1	2	3	4	5	6	7	8			
4.03.	KEUANGAN							4.612.030	8.338.420	
4.03.4.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik yang profesional dan Amanah			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran100%			1.071.465	1.323.538	
4.03.4.03.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Bapenda		Materai 6000 Materai 3000	1750 lembar	Tercapainya penyelenggaraan jasa surat menyurat100%	10.050	18.000
4.03.4.03.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Bapenda		Tersedianya telepon dan air	96000000 24000000	Lancarnya operasional kantor bapenda100%	120.000	144.000
4.03.4.03.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Bapenda		Laporan bulanan, triwulanan ,semesteran dan tahunan	4 laporan	Terciptanya Pelayanan Administrasi Keuangan yang Handal dan Prima100 %	72.006	128.407
4.03.4.03.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Bapenda		Tersedianya tenaga Cleaning Service	2 Orang	Terpeliharanya Kebersihan kantor100 %	37.000	37.000
4.03.4.03.02.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Bapenda		Berfungsinya Peralatan Kerja Kantor	25 Unit	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi100%	-	-

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)	
						Keluaran	Hasil			
1	2	3	4	5	6	7	8			
4.03.4.03.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Bapenda		Tersedianya Alat Tulis kator50 Jenis	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan tugas kantor100%	201.640	241.968	
4.03.4.03.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Bapenda		Barang Cetakan Penggandaan1 Paket103450 Lembar	Penunjang Operasional Bahan Kegiatan100%	74.450	101.340	
4.03.4.03.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Bapenda		Alat-alat Listrik407 Buah	Penerangan Gedung Kantor100%	21.895	26.274	
4.03.4.03.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bapenda		Alat -alat Penunjang Kantor5 Paket	Kelancaran Operasional Badan100%	144.000	172.800	
4.03.4.03.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Bapenda		Maajalah dan Surat Kabar3 Paket	Penyerapan Informasi Berita Regional dan Nasional100%	20.124	24.149	
4.03.4.03.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Bapenda		Mamin Rapat Mamin Tamu Mamin Pegawai4800 Dus900 Dus600 Dus	Penunjang Operasional Badan100%	78.700	94.440	
4.03.4.03.02.01.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Bapenda		Rapat /Konsultasi Ke Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat12 Bulan	Berjalannya Komunikasi dengan Stakeholder Lainnya100%	145.000	174.000	
4.03.4.03.02.01.019.	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis / Administrasi			Bapenda		jasa Pendukung Tenaga Teknis/Administratif12 Orang	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi/ Teknis100%	72.800	87.360	
4.03.4.03.02.01.026.	Penyediaan Jasa Pendukung Pelaksana Teknis Lainnya			Bapenda		Petugas Piket kantor9 Orang	Meningkatnya Keamanan Lingkungan Kantor100 %	73.800	73.800	

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.03.4.03.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik yang profesional dan Amanah			Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur100%			70.000	84.000
4.03.4.03.02.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor			Bapenda		Tersedianya Bangunan Kantor dan Pelayanan yang Representatif12 Bulan	Meningkatnya sarana dan pelayanan pajak daerah100 %	-	-
4.03.4.03.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor			Bapenda		Tersedianya Perlengkapan Ruangn Kantor1 Paket	Meningkatnya sarana ruangan kerja yang nyaman100%	-	-
4.03.4.03.02.02.010.	Pengadaan Meubeulair			Bapenda		Meja dan Kursi Lemari arsip8 Jenis2 Jenis	meningkatnya kelengkapan sarana aparatur100%	-	-
4.03.4.03.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Bapenda		Tersedianya Pelaburan Gedung Kantor1 paket	Meningkatnya gedung kantor yang nyaman100%	-	-
4.03.4.03.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bapenda		Sevice Suku Cadang Pelumas BBM10 Unit5 Unit10 Unit1440 Liter	tersedianya sarana operasional aparatur yang optimal100%	70.000	84.000
4.03.4.03.02.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Bapenda		tertatanya gedung kantor yang refresentatif1 Paket	Terciptanya Sarana Pelayanan yang optimal100%	-	-
4.03.4.03.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik yang profesional dan Amanah			Meningkatnya disiplin aparatur100%			-	81.420

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.03.4.03.02.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Bapenda		Tersedianya Pakaian Dinas Harian0	Meningkatnya Sarana Penunjang operasional Badan0	-	42.000
4.03.4.03.02.03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Bapenda		Tersedianya pakaian Batik0	Meningkatnya sarana operasional apartur0	-	39.420
4.03.4.03.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik yang profesional dan Amanah			Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur100%			50.000	60.000
4.03.4.03.02.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Bapenda		Diklat PPNS2 Orang	Meningkatnya Kualitas SDM Bapenda100%	50.000	60.000
4.03.4.03.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik yang profesional dan Amanah			Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan100%			22.334	26.801
4.03.4.03.02.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Bapenda		Lakip, LPPD, LKPJ3 Dokumen	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan100%	22.334	26.801
4.03.4.03.02.07.	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik yang profesional dan Amanah			Meningkatnya perencanaan SKPD100%			-	-

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.03.4.03.02.07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			Bapenda		Renja, Renstra, 2 Dokumen	Meningkatnya Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan targrt SKPD 100%	-	-
4.03.4.03.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik yang profesional dan Amanah			Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %			3.398.231	6.762.661
4.03.4.03.02.17.019.	Pendataan Obyek dan Subyek PBB			Bapenda		Data Obyek dan Subyek PBB terbaru 0	Meningkatnya Pendapatan dari sector PBB 0	-	540.000
4.03.4.03.02.17.046.	Pemberian penghargaan kepada kecamatan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pencapaian target PBB			Bapenda		Tersedianya reward bagi Kecamatan, desa/kelurahan berprestasi 0	Meningkatnya pendapatan asli daerah 0	-	500.000
4.03.4.03.02.17.047.	Penyediaan Sarana Penunjang Administrasi PBB dan BPHTB			Bapenda		Sarana Penunjang Administrasi PBB dan BPHTB TTS Buku Harian Kolektor Buku Rekapitulasi Setoran PBB	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi PBB dan BPHTB 100%	108.689	130.427
4.03.4.03.02.17.049.	Penyampaian Sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP			bapenda		Sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP \$2 Kecamatan	Meningkatnya kewajiban membayar pajak 100%	60.550	72.660
4.03.4.03.02.17.050.	Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah			bapenda		Terlaksananya system penagihan yang optimal 1 paket	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah 100%	142.789	171.347

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.03.4.03.02.17.051.	Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah			Bapenda		system self assesment dan office assesment1 Paket	Meningkatnya kesadaran wajib pajak membayar pajak daera secara langsung100%	220.267	264.321
4.03.4.03.02.17.054.	Penertiban Pajak Daerah			Bapenda		Penertiban Pelanggaran Pajak Daerah12 Kali	Meningkatnya ketertiban pajak daerah100%	141.000	169.200
4.03.4.03.02.17.055.	Pengawasan Pajak Daerah			Bapenda		Meminimalisir pelanggaran Pajak1 paket	Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak100%	102.057	22.468
4.03.4.03.02.17.063.	Pengelolaan Penangan Keberatan dan Pengaduan Pajak			Bapenda		Informasi pengaduan pajak daerah1 dokumen	Tercapainya penyelesaian keberatan dan pengaduan pajak daerah100%	78.000	93.600
4.03.4.03.02.17.064.	Pengelolaan Pajak Daerah			Bapenda		Formulir sarana pelayanan pajak daerah13 formulir	Teribnya pengelolaan pajak daerah1005	311.500	373.800
4.03.4.03.02.17.065.	Penyediaan DHKP PBB-P2			Bapenda		Tersedianya DHKP42 Kecamatan	Tertibnya dokumen DHKP100%	197.450	236.940
4.03.4.03.02.17.066.	Penyediaan SPPT PBB-P2			Bapenda		Tersedianya SPPT PBB P242 Kecamatan , 442 desa dan Kelurahan	Tertibnya dokumen SPPT PBB P2100%	197.450	236.940
4.03.4.03.02.17.067.	Pengelolaan Aplikasi SIP PBB			Bapenda		Tersedianya Tenaga kerja pengelola administrasi PBB outsourcing10 Orang	Tertib aplikasi SIP PBB dalam administrasi PBB100%	211.202	253.442

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.03.4.03.02.17.091.	Pendataan Individual Sebjek dan Objek PBB P2 (swakelola)			Bapenda		perubahan data pendataan individual objek dan subyek PBB p21 Dokumen	Peningkatan Pokok Ketetaoan BB P2100%	-	-
4.03.4.03.02.17.092.	Pemeliharaan Basis Data PBB P2			Bapenda		data input wajib pajak10 desa	Tertib administrasi basis data pajak100%	75.500	90.600
4.03.4.03.02.17.093.	Pemutakhiran Database pajak daerah			Bapenda		Terpeliharanya sever data wajib pajak daerah0	Tertib administrasi database pajak daerah0	-	61.800
4.03.4.03.02.17.098.	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil			Bapenda		Terlaksananya rekon dana bagi hasil0	Akurasi data hasil rekonsiliasi dana bagi hasil0	-	54.000
4.03.4.03.02.17.099.	Pengelolaan Pembukuan dan Pelaporan			Bapenda		tersedianya laporan pendapatan1 dokumen	Laporan pendapatan yang akuntabel100%	26.128	31.354
4.03.4.03.02.17.100.	Rekonsiliasi Piutang PBB			Bapenda		Tersedianya dokumen rekon pendapatan dan piutang PBB1 dokumen	Tersusunnya Laporan rekon piutang PBB yang akuntabel100%	64.772	77.726
4.03.4.03.02.17.103.	Koordinasi Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			bapenda		Tersedianya pembukuan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah1 dokumen	Tersusunnya laporan pengelolaan pembukuan pajak daerah dan retribusidaerah yang akuntabel100%	38.470	46.164
4.03.4.03.02.17.110.	Evaluasi Pendapatan Daerah			Bapenda		Tersedianya laporan Evaluasi pendapatan daerah1 dokumen	Tersusunnya laporan evaluasi pendapatan yang akuntabel100%	36.130	43.356

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.03.4.03.02.17.111.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak			Bapenda		Terlatihnya 0 aparaturnya pengelola pajak daerah	Meningkatnya 0 kuaalitas aparatrur pengelola pajak	-	60.000
4.03.4.03.02.17.112.	Intensifikasi Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Bapenda		Tersedianya 0 perubahan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkatnya 0 pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah	-	146.826
4.03.4.03.02.17.114.	Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Pendapatan Daerah			Bapenda		Tersedianya 1 data rekon pendapatan yang tertib Dokumen	Meningkatnya 100% kualitas data pendapatan daerah	-	-
4.03.4.03.02.17.115.	Penyampaian Informasi Pajak dan Retribusi Daerah			Bapenda		terselenggarany 100 Oranga informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkatnya 100% wawasnpajak daerah dan retribusi daerah	-	-
4.03.4.03.02.17.116.	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah			Bapenda		Tersedianya 1 perencanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dokumen	Meningkatnya 100% pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	-	-
4.03.4.03.02.17.118.	Pemeliharaan Aplikasi Pendapatan Daerah			Bapenda		Tersedianya 1 replikasi data dokumen	Terpeliharanya 100% aplikasi pendapatan daerah	80.700	96.700
4.03.4.03.02.17.119.	Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah (TI)			Bapenda		website/aplikasi 1 data central Paket	Meningkatnya 100% kemudahan/akses wajib pajak	226.950	272.340
4.03.4.03.02.17.120.	Peningkatan Pelayanan dan Hadiah Bagi Pembayaran Pajak Daerah (Pelayanan Ibadah)			Bapenda		Reward bagi 22 Orangwajib pajak dan aparaturnya berprestasi	Meningkatnya 100% kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak	35.397	204.000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.03.4.03.02.17.122.	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi PBB dan BPHTB			bapenda		Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB dan BPHTB6 Kali	Pembayaran PBB dan BPHTB tepat waktu100%	300.050	360.000
4.03.4.03.02.17.128.	Penyediaan Peralatan Cetak PBB			Bapenda		Tersedianya mesin Printonik0	Meningkatnya kecepatan cetak penncetakan sarana PBB0	-	480.000
4.03.4.03.02.17.129.	Penyediaan Meteran Air tanah			Bapenda		Tersedianya meteran air tanah0	Meningkatnya penerimaan dari pajak air tanah0	-	622.435
4.03.4.03.02.17.130.	Optimalisasi Penyusunan Laporan Realisasi PBB dan BPHTB			Bapenda		Tersedianya dokumen laporan realisasi PBB dan BPHTB1 dokumen	Tertibnya laporan realisasi PBB dan BHTB100%	52.500	63.000
4.03.4.03.02.17.131.	Penyusunan Regulasi Pendataan Daerah			Bapenda		Tersedianya peraturan pendapatan daerah1 Paket	Terwujudnya kepastian hokum pengelolaan Pendapatan Daerah100%	10.000	12.000
4.03.4.03.02.17.132.	Penyusunan Dokumen Roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Bapenda		Tersedianya roadmap perencanaan pajak daerah dan retribusi daerah1 dokumen	Meningkatnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah100%	61.380	73.656
4.03.4.03.02.17.133.	Penyediaan Aplikasi Pelaporan Pajak Online Sistem			Bapenda		Tersedianya Tapping Box1 Paket	Meningkatnya akurasi pelaporan omzet wajib Pajak100%	567.850	681.420

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.03.4.03.02.17.134.	Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah			Bapenda		Tersedianya 5 Orang jasa tenaga kerja pengelola PBB	Tersedianya 100% basis data untuk peningkatan pajak	41.450	49.740
4.03.4.03.02.17.135.	Penyediaan Aplikasi SPTPD Online			Bapenda		Tersedianya 0 aplikasi SPTPD Online	Meningkatnya 0 pendataan pajak daerah yang cepat dan akuntabel	-	158.400
TOTAL								4.612.030	25.015.261

GARUT, 05 September 2017
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Usep Basuki Eko, SH., MH
19661230 1997031 002